



Pengemudi Betor Minta Solusi Manusiawi

■ Rencana Penertiban Becak Motor Secara Bertahap di Kawasan Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Upaya menjadikan Malioboro sebagai kawasan wisata yang ramah lingkungan membuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berani mengambil langkah penertiban becak motor (betor) secara bertahap. Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul kekhawatiran dari para pengemudi becak motor yang telah puluhan tahun mencari nafkah di jantung Kota Gudeg. Mereka menilai bahwa penertiban ini tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa solusi yang jelas.

Retna Paguyuban Tukang Becak Prasajo, Purwanto mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai rencana penertiban itu. Ia berharap penertiban tak sekadar menertibkan, tetapi juga memberi panduan teknis dan jaminan agar para pengemudi tidak kehilangan sumber penghasilan.

"Selama ini belum diinfo, penertibannya seperti apa dan teknisnya gimana dulu setidaknya. Sebagai warga negara tentunya kami harus patuh pada aturan pemerintah, tapi di sisi lain pemerintah juga jangan semena-mena sama warganya. Harus ada solusi yang terleak," ujar Purwanto saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).

Purwanto menyebut, wacana penggantian betor menjadi becak kayu bertena listrik sebenarnya sudah lama didiskusikan. Beberapa pengemudi bahkan telah mencoba menggunakan becak listrik. Namun, menurutnya, uji coba tersebut belum memberikan hasil yang memadai karena keterbatasan tenaga dan infrastruktur pendukung.

"Kami dan anggota menyarankan, kalau hanya diganti tenaga listrik nanti kekuatannya tidak memadai dan tidak bisa untuk mengangkut beban berat, terutama di tanjakan jalan," jelasnya.

Paguyuban Tukang Becak

Prasajo memiliki sekitar 97 anggota aktif. Sebagian besar merupakan warga Kota Yogya yang bergantung hidup sepenuhnya dari menarik becak motor. Karena itu, menurut Purwanto, kebijakan apa pun harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi mereka.

"Kalau memang mau ditata, kami setuju. Tapi, harus ada jalan keluar yang manusiawi, jangan sampai setelah ditertibkan kami justru kehilangan pekerjaan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dewanti Indrayanti, menegaskan bahwa rencana penertiban becak motor bukanlah upaya untuk menghapus mata pencaharian para pengemudi. Penertiban, kata dia, ingin menata moda transportasi agar lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan kesejahteraan warga.

"Kami tidak ingin mematahkan ekonomi masyarakat, tetapi menata. Bisa secara bertahap atau jumlah layanan. Kami melarang, tapi ada solusinya, yakni becak kayu bertena alternatif," ujarnya.

Ni Made menjelaskan, pemerintah telah berupaya sejak 2020 untuk memperkenalkan becak listrik dan becak kayu tenaga alternatif, meski implementasi di lapangan masih terbatas. Saat ini, baru tersedia sekitar 90 unit becak listrik yang dimiliki oleh Pemda DIY.

"Sekarang saya lagi sound-ing dengan beberapa pihak untuk 1.000 unit, tapi sifatnya masih peninjakan," paparnya.

Jaga ruang publik

Ia menambahkan, proses konsolidasi dengan paguyuban becak motor memang tidak mudah. Beberapa pengemudi yang sudah menerima becak listrik pun belum aktif beroperasi di kawasan Malioboro.

CARI JALAN KELUAR

- Pemda DIY bakal melakukan penertiban becak motor di kawasan Malioboro secara bertahap.
- Para pengemudi betor meminta penertiban itu dilakukan dengan jaminan bahwa mereka tak kehilangan sumber penghasilan.
- Uji coba dengan becak kayu bertena listrik dinilai belum memberikan hasil yang memadai karena keterbatasan tenaga dan infrastruktur pendukung.

Bagi Pemda DIY, penertiban becak motor merupakan bagian dari upaya menjaga citra Malioboro sebagai ruang publik yang nyaman, tertib, dan aman bagi wisatawan. Penataan juga diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas yang beberapa kali melibatkan becak motor.

"Harapan besar kami semua ini bisa diikuti. Bukan kami mematahkan ekonomi masyarakat, tapi kami sudah memberikan opsi. Becak motor itu kan juga legal. Datanya sekitar 2.000-an beberapa tahun lalu, dan tidak semuanya juga ber-KTP stasi (Yogyakarta)," tutur Ni Made.

Ia juga menyinggung perlu adanya pembagian zona layanan agar lalu lintas di kawasan Malioboro tetap terkendali. Sebab, dengan semakin banyaknya wisatawan dan pejalan kaki, kepadatan becak motor dikhawatirkan mengganggu kenyamanan kawasan pedestrian. "Kami berpikir akan ada pembagian sisi layanan supaya kawasan itu tidak terlalu padat. Malioboro itu untuk semua, jadi harus nyaman untuk semua," tandasnya. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005